

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pemprov Inventarisasi Aset THR Lokasari

JAKARTA - Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta Pujianto menjelaskan, pihaknya akan terus memastikan Pemprov DKI optimal dalam penghitungan potensi pendapatan yang berada di kawasan THR Lokasari Jakarta Barat.

Aset Pemprov DKI di lahan THR Lokasari seluas 5,4 hektare. Terdapat tiga pihak yang menguasai. Kondisi existing oleh Pemprov DKI. Kala itu, Pemprov DKI memiliki bangunan ruko di lokasi tersebut dari hasil pengelolaan Badan Pengelola THR Lokasari.

"Kemudian ada bidang lagi yang dikerjakan dalam bentuk pihak ketiga yaitu PT Gemini Sinar Perkasa dan PT Tenang Jaya," kata Pujiono, Senin (3/2/2020).

Pujiono mengungkapkan, pengelolaan HPL 1 Tangki sejauh ini telah diakuisisi oleh PT Tenang Jaya. Sebab, memiliki dasar hukum melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 32/1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Dengan dasar aturan itu, PT Tenang Jaya memiliki hak seluruhnya untuk pengelolaan. "Sehingga mereka mendapat bagian untuk pengelolaan lahan (THR Lokasari) ini. Tapi HPL nya semua saat ini tetap milik Pemprov DKI," ucap dia.

Sedangkan, lahan yang diteruskan kepada BPAD 5,4 hektare saat ini rata-rata menjadi kios-kios. Kemudian, menjadi tempat parkir. "Itulah yang dikelola oleh Pemprov DKI (BPAD) meneruskan dari BP THR Lokasari yang telah dilikuidasi," jelas dia.

Pujiono menambahkan, ada beberapa catatan terkait inventarisasi. Nantinya, BPAD melaporkan secara tertulis. "Nanti kami BPAD bersama tim akan menyusun

itu, termasuk dasar-dasar hukumnya," tutur dia.

Pujiono menerangkan, BPAD DKI Jakarta telah menginventarisasi aset senilai Rp475 triliun dengan rincian aset tetap sekitar Rp438 triliun dan aset tetap lainnya sekitar Rp37 triliun. "Aset-aset tersebut tersebar di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta," kata dia.

Selain itu, inventarisir yang dilakukan sebagai wujud untuk mempertahankan opini WTP dari BPK yang sebelumnya sudah diraih. Ia juga akan memastikan bahwa aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI. "Bersama pihak manapun dan berkomunikasi dengan berbagai komponen agar bisa mengoptimalkan aset-aset kita," ucap dia.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD DKI Syahrial mengatakan, data inventarisasi yang dimiliki Pemprov DKI dibutuhkan untuk menghitung secara ril kontribusi pemanfaatan aset yang kini digunakan dua pengembang.

Syahrial juga menyebutkan, bahwa pemanfaatan aset di THR Lokasari seluas 5,4 hektare hanya mendatangkan pendapatan sekitar Rp53 miliar. Ia khawatir jika aset yang dimiliki Pemprov DKI tidak sesuai, bisa mahal dan bisa saja sangat murah. "Makanya kita butuh informasi yang pas agar pendapatan kita dari aset THR Lokasari bisa membaik," ujar dia.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi menginginkan agar inventarisasi aset yang dimiliki Pemprov DKI dapat digenjut. Sehingga, opini WTP dari BPK dapat dipertahankan. "Dorongan dari dewan semua aset harus diinventarisasi sesuai dengan aturan," pungkas dia. (bar)